PENGANTAR: PRAKTEK MENYUSUN

KETERKAITAN MASALAH, KEBIJAKAN PUBLIK DAN *PENGAMBILAN KEPUTUSAN*

PERTEMUAN 1 (REGULER A,B&PARALEL)

Dr. NOVERMAN DUADJI

CAPAIAN PEMBELAJARAN

- MEMAHAMI MASALAH DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
- 1. MEMAHAMI KETERKAITAN KEBIJAKAN PUBLIK (FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK) DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

MAKNA MASALAH

- MASALAH YANG MENYENTUH KEPENTINGAN ORANG BANYAK ATAU PUBLIK BILA MASALAH INI TIDAK DICARIKAN SOLUSI MAKA AKAN BERKEMBANG SEDEMIKIAN RUPA YANG SEMAKIN MERUGIKAN PUBLIK
- MASALAH MENDASAR ITU SEPERTI: KELANGKAAN BBM,KENAIKAN HARGA YANG TAK TERKENDALI, MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN, KEMISKINAN DALAM PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN YANG RUSAK DAN TIDAK LAYAK PAKAI MASALAH TERSEBUT MEMERLUKAN SOLUSI DALAM BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK

IDENTIFIKASI MASALAH

MASALAH DAPAT DIIDENTIFIKASI MELALUI ANALISIS TERHADAP INFORMASI YANG KREDIBLE MELALUI: PENGAMATAN LANGSUNG

- 1) SURVEY
- 2) RESEARCH
- 3) LAPORAN-LAPORAN.

INFORMASI HASIL ASSESMENT DIKAJI UNTUK MENEMUKAN MASALAH MENDASAR YANG MENYENTUH KEPENTINGAN PUBLIK MASALAH-MASALAH TERSEBUT DIBUAT DALAM LONG LIST DAN DISARING MENJADI SHORT LIST MASALAH TSB BIRILIH MANA YG PALING PRIORITAS.

RUMUSAN MASALAH

PERNYATAAN MASALAH DAN URAIAN MASALAH DENGAN DATA DATA DAPAT DISAJIKAN DALAM GRAFIK DAN ATAU TABEL DATA HARUS DISEBUTKAN SUMBERNYA

KRITERIA MASALAH

ADALAH:

- 1) MENYENTUH KEPENTINGAN PUBLIK
- 2) JELAS DAN SPESIFIK,
- 3) DIRUMUSKAN DALAM BAHASA YANG BAIK DAN BENAR,
- 4) SUBSTANSI JELAS DAN SPESIFIK
- 5) KATA-KATA YANG DIPILIH LUGAS DAN MUDAH
- 6) DIMENGERTI MENGANDUNG DAMPAK JANGKA JAUH

TUJUAN

- TUJUAN HARUS DICAPAI BILA SOLUSI TERHADAP MASALAH DITEMUKAN DAN DAPAT DILAKSA-NAKAN
- TUJUAN HARUS DIRUMUSKAN JELAS DAN SPESIFIK
- TUJUAN DAPAT DIURAIKAN KE DALAM OBJEK DAN SASARAN
- TUJUAN HARUS BERMAKNA BAGI PUBLIK TUJUAN
- BILA DIUKUR DAN DI MATCH DENGAN MASALAH, MAKA MASALAH ITU MEMANG TERSELESAIKAN, BAIK SEBAGIAN MAUPUN SELURUHNYA

KEBIJAKAN PUBLIK

Secara konseptual kebijakan hrs dpt membantu merealisasikan tuntutan / kebutuhan manusia, a.l.

- Kekuasaan (POWER): yaitu keikut sertaan dlm pengambilan keputusan
- Pencerahan dr kebodohan (ENLIGHTENMENT), yaitu pemahaman, pengetahuan informasi;
- 3) Kekayaan (WEALTH), yaitu pengha-silan dan hak milik;
- 4) Kesejahteraan (WELL-BEING), yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan;
- 5) Keterampilan (SKILL), yaitu kemahiran dlm melaksanakan tugas;
- 6) Perasaan kasih sayang (AFFECTION), yaitu cinta kasih, persahabatan, kesetiaan, dan solidaritas;
- Penghargaan (RESPECT), yaitu: kehormatan, status, reputasi, dan nondiskriminasi;
- 8. Kejujuran (RECTITUDE), yaitu kecocokan dg standar etik dan keagamaan.

POLICY COMPREHENSIVENESS (Tujuan/Output)

Kekomprehensipan kebijakan dimanifestasikan dlm pertanyaan berikut:

- Tujuan dan tata nilai yg bagaimana yg akan dicapai dan siapa yg akan mencapai tujuan itu?
- Kecenderungan apakah yg mempengaruhi pencapaian tata nilai itu ?
- 3. Dimanakah kemungkinan mulai timbulnya masalah?
- 4. Faktor-faktor apakah yg menyebabkan masalah tersebut timbul ?
- 5. Bagaimanakah faktor tsb mempengaruhi dan mendorong terjadinya masalah tsb?

LANJUTAN

- 6) Kemanakah arah atau perkembangan yg kelihatannya akan terjadi di masa depan, terutama bila tdk dilakukan intervensi?
- 7) Intervensi apa yg dpt dilakukan utk mengubah arah agar tujuan tercapai, seperti yg diharapkan dan untuk siapa intervensi itu di lakukan ?
- 8) Siapa yg hrs dilibatkan dlm melakukan intervensi agar tujuan yang ingin diwujudkan tercapai
- Bgm merumuskan sasaran-sasaran yg jelas agar mudah menditeksi apakah kebijakan yg dilaksanakan mengarah kpd pencapaian tujuan yg diinginkan atau tidak.
- Daya dukung apa yg hrs dipersiapkan agar tujuan kebijakan dpt diwujudkan dg tepat
- Dukungan politik yg bgm yg dibutuhkan agar kebijakan dpt dilaksanakan dengan baik
- Bgm alat ukur yg tepat dirumuskan agar tk ketercapaian kebijakan tdk bias.